

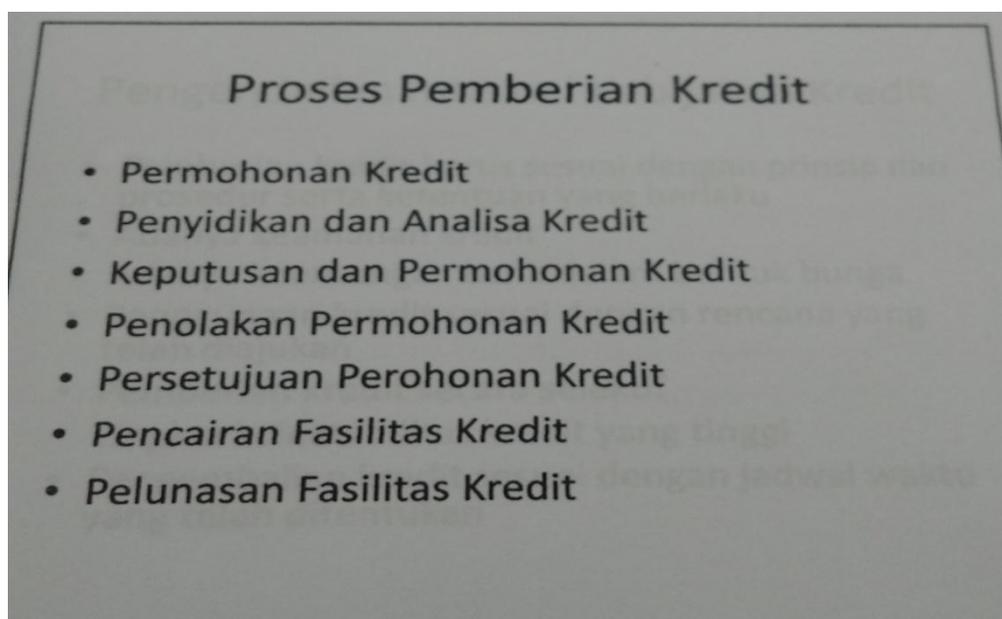
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Program kerja praktek ini berlangsung selama kurang lebih satu bulan, dalam waktu – waktu tersebut penulis melakukan pengidentifikasian masalah terutama penyebab munculnya pinjaman bermasalah, penulis mencari faktor – faktor penting yang menjadi penyebab munculnya pinjaman bermasalah baik dari internal maupun eksternal perusahaan.

Penulis memulai dengan mencari tahu prosedur pemberian pinjaman melalui dokumen – dokumen yang terdapat di Koprasi Pegawai Republik Indonesia Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan ,proses dan prosedurnya adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1 Prosedur Pemberian kredit/pinjaman KPRI

Setelah mendapatkan prosedur pemberian pinjaman tersebut, penulis berusaha mencari bagian pada prosedur tersebut yang dapat dibenahi sehingga lebih berhati – hati lagi dalam memberikan pinjaman kepada pegawai, hal ini sesuai dengan salah satu prinsip KPRI yaitu prinsip kehati – hatian. Penulis mendapatkan suatu pemikiran pada bagian analisa pinjaman bahwa bagian tersebut dapat dibenahi dan menambahkan satu bagian yaitu monitoring pinjaman yang akan dilakukan oleh bagian pengendalian internal.

Pada bagian analisa pinjman yang biasanya hanya dilakukan oleh bagian analis pinjaman, supaya lebih maksimal lagi dalam menganalisa, maka bagian pengendalian internal akan menganalisa dokumen pegawai juga. Kemudian dari tahap awal permohonan pinjaman sampai kepada tahap terakhir yaitu pelunasan pinjaman akan dibantu monitoring oleh bagian pengendalian internal, sehingga kegiatan monitoring pinjaman juga akan lebih maksimal.

Hasil yang didapat daripada rancangan solusi yang telah dipaparkan pada bab 3 adalah bahwa Koprasi Pegawai Republik Indonesia menerima dengan baik rancangan solusi tersebut dan akan mulai mencoba melakukan rancangan solusi tersebut agar pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Koprasi Pegawai Republik Indonesia dapat lebih optimal dan diharapkan akan memberikan hasil atau timbal balik yang positif terhadap pihak. Oleh karena rancangan solusi di Koprasi Pegawai Republik Indonesia terima maka akan dibuat rancangan prosedur pemberian pinjaman yang baru yang akan ditampilkan dalam sub bab selanjutnya yaitu pembahasan.

4.2 Pembahasan

Seperti yang sudah penulis paparkan pada bab 3 tentang temuan masalah pinjaman macet, beserta dengan faktor – faktor internal dan eksternalnya. Penulis mencoba memberikan suatu masukan pada bagian analisa pinjaman yaitu bagian analisa pinjaman dilakukan oleh bagian analis pinjaman dibantu dengan bagian pengendalian internal, sehingga dokumen pegawai dianalisa dua kali agar tidak terjadi kelalaian dalam menganalisa dokumen pegawai, dan masing – masing bagian tersebut akan memberikan pendapatnya mengenai hasil analisa mereka masing – masing.

Sehingga Bendahara dalam mempertimbangkan untuk memberikan pinjaman kepada pegawai dapat menggunakan pendapat dari kedua bagian tersebut sebagai acuan yang lebih baik. Karena kedua bagian tersebut bisa saja menghasilkan pendapat yang berbeda sesuai dengan hasil analisa mereka, Bendahara dapat memberikan persetujuan atau penolakan pemberian pinjaman dengan lebih berhati – hati.

Kemudian setelah bagian analisa pinjaman dibenahi, penulis merasa bahwa hal itu saja masih belum cukup untuk menghindari atau setidaknya mengurangi terjadinya pinjaman bermasalah, karena faktor – faktor yang menjadi penyebab munculnya pinjaman bermasalah cukup banyak. Penulis mencoba menambah satu bagian dalam prosedur pemberian pinjaman yaitu bagian pemantauan pinjaman.

Bagian pengendalian internal akan melakukan monitoring pinjaman mulai dari internal perusahaan, seperti yang telah dibahas pada sub bab 3.4, memantau prosedur pemberian pinjaman yang dilakukan dari tahap awal, memantau komite pinjaman pada saat menyetujui pemberian pinjaman, memantau apakah pinjaman yang diberikan tepat sasaran atau tidak, kemudian melakukan pemantauan pada sektor eksternal perusahaan, seperti melihat setiap menerima gaji mereka untuk melihat perkembangannya, memantau penggunaan pinjaman pegawai apakah sesuai dengan permohonan pegawai pada saat melakukan pengajuan pinjaman, memantau pembayaran angsuran pegawai agar pembayaran angsuran terkendali dan tidak menimbulkan pinjaman yang bermasalah.

Dengan kedua solusi tersebut diharapkan mampu menghindari atau setidaknya mengurangi terjadinya pinjaman bermasalah / macet, namun apabila pinjaman bermasalah tetap terjadi, ada beberapa opsi yang dilakukan oleh Koprasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) sebagai berikut :

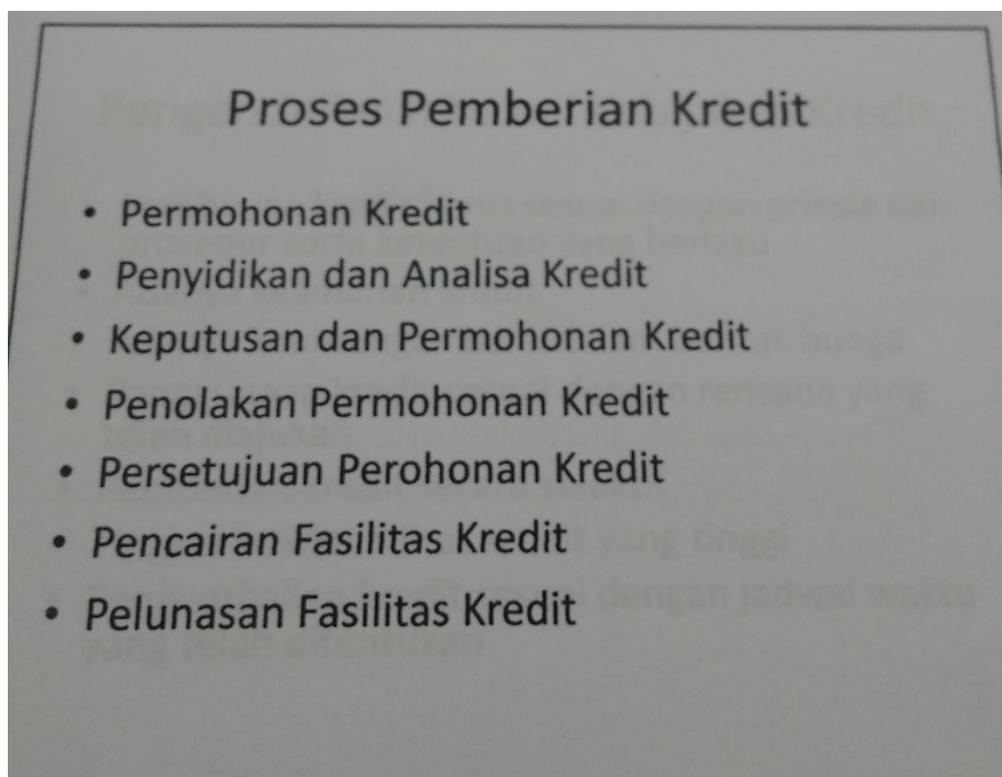
- Pegawai dikunjungi untuk ditagih angsurannya secara langsung
- Pegawai diberikan surat peringatan secara bertahap untuk segera melunasi hutangnya
- Pegawai diberikan surat panggilan, untuk datang ke kantor dan ditegaskan untuk segera melunasi hutangnya

Dengan berkurangnya kejadian pinjaman bermasalah atau meningkatnya pinjaman lancar maka akan memberikan penilaian positif pada suatu koprasi, bahwa artinya pinjaman yang diberikan telah tepat sasaran, pembayaran

angsuran pegawai terkendali, dan perputaran uang pada koperasi tersebut lancar. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura, Dan Perkebuan selalu berusaha untuk mengurangi terjadinya pinjaman bermasalah, diharapkan dengan adanya usulan tambahan ini Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebuan dalam mengurangi terjadinya pinjaman bermasalah.

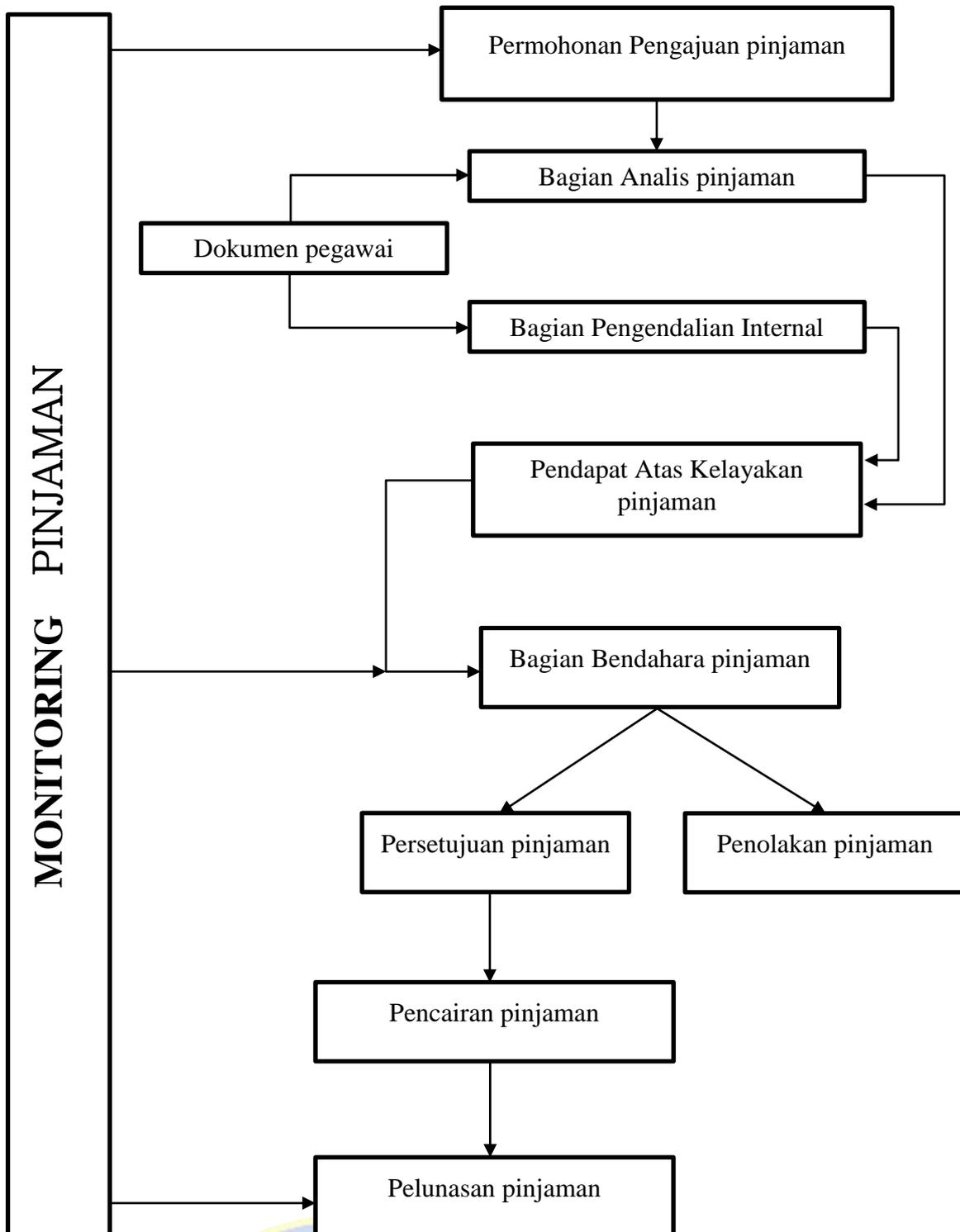
Dengan bertambahnya usulan dalam pemberian pinjaman, maka prosedur pemberian pinjaman akan berubah atau akan ditambah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebuan bahkan beberapa tahap.

Prosedur Sebelumnya adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2.1 Prosedur Pemberian Kredit/pinjaman KPRI

Rancangan prosedur yang baru adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2.2 Rancangan Prosedur Pemberian Kredit /pinjaman KPRI